**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tangah

Kota Padang, Sumatera Barat 25171 www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

Nomor : ….. 18 September 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Himpunan Permasalahan

Yth. Ketua Kamar Agama MA RI

di Jakarta

Assalamualaikum Wr.Wb,

Menindaklanjuti surat Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/TUAKA-PA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, maka bersama ini dikirimkan permasalahan di bidang Hukum Keluarga, Hukum Waris, dan Hukum Ekonomi Syari’ah sebagai bahan pleno Kamar agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 Wassalamualaikum Wr. Wb.,

Ketua

 Pelmizar

Tembusan:

Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI

LAMPIRAN

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Nomor: ……

Tanggal: ……..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Permasalahan** | **Dasar Hukum/ Norma** | **Usulan Solusi** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **HUKUM KELUARGA** |
| 1 | Perlu adanya penegasan terhadap pembagian harta bersama yang menjadi/ dijadikan jaminan di bank oleh salah satu pihak Suami/ Istri sewaktu masih rukun membina rumah tangga, sehingga hakim tidak selalu me-NO perkara tersebut dengan pertimbangan sedang dijadikan jaminan hutang di bank. |  |  |
| 2 | Untuk aturan perceraian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) apakah masih merujuk ke PP 10 Tahun 1983 dan PP 45 Tahun 1990, mengingat narasi di PP tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). | PP 10 Tahun 1983, dan PP 45 Tahun 1990 |  |
| **HUKUM WARIS** |
| 1 | Bolehkah mengajukan perkara permohonan mafqud secara terpisah dari gugatan waris? |  | Pengajuan permohonan mafqud harus dikumulasi dengan gugatan waris, jika tidak maka sangat potensial menghilangkan hak orang yang akan ditetapkan mafqud atau ahli waris mafqud tersebut. |
| 2 | Bagaimana teknis pemeriksaan perkara mafqud? |  | Harus diumumkan pada media nasional 3 (tiga) kali dimana ajarak antara pengumuman selama 3 (tiga) bulan. |
| 3 | Eksekusi akta perdamaian, berupa penyerahan sertifikat dari Termohon eksekusi kepada Pemohon eksekusi. Termohon eksekusi tidak mau menyerahkan SHM, upaya apa yang harus dilaksanakan? |  | 1. Ketua pengadilan menyatakan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan2. Berdasarkan pernyataan ketua pengadilan tersebut, diajukan permohonan kepada BPN untuk menerbitkan sertifikat baru dengan menyatakan bahwa sertifikat yang ditahan oleh pihak Termohon tidak berlaku lagi |
| **HUKUM EKONOMI SYARI’AH** |
| 1 | Apabila ada sengketa dengan pinjaman syariah online, dimanakah kewenangan relative untuk mengajukan gugatan? |  |  |
| 2 | Berdasarkan Perma 2 Tahun 2015, bahwa perkara gugatan sederhana oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Sementara upaya hukum keberatan disidangkan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Apabila di satker hanya terdiri dari 3 orang hakim (ketua dan 2 orang hakim anggota) dan hanya ketua yang telah bersertifikasi ekonomi syari’ah, sementara 2 orang hakim lainnya belum bersertifikat. Apakah perkara tersebut ditangani oleh ketua pengadilan atau hakim yang belum bersertifikat? Jika perkara tersebut harus diselesaikan hakim yang bersertifikat (ketua pengadilan), dan jika perkara diputus dan diajukan upaya hukum keberatan maka otomatis akan disidangkan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh ketua pengadilan (hakim yang menyidangkan perkara GS). |  |  |